

**WAKAF TUNAI: TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :
AHMAD NUR FADILAH
NIM : 18086040017

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2021**

LEMBAR PESETUJUAN

**WAKAF TUNAI: TELAAF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

Disusun Oleh :

AHMAD NUR FADILAH

NIM : 18086040017

Telah disetujui pada tanggal 18 Desember 2021



Pembimbing I,

Dr. H. Slamet Firdaus, MA
NIP. 19571109 198803 1 002

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 19590320 198403 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD NUR FADILAH

NIM : 18086040017

Program Studi : Hukum Perdata Islam

Pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 18 Desember 2021



Ahmad Nur Fadilah

NIM. 18086040017

Dr. H. Slamet Firdaus, MA
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 Eksemplar
Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Muhamad Aip Syaripuddin yang berjudul "WAKAF TUNAI: TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002" telah dapat untuk diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 18 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. H. Slamet Firdaus, MA

NIP. 19571109 198803 1 002

Prof. Dr. H. Sugianto, MH
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 Eksemplar
Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Muhamad Aip Syaripuddin yang berjudul "WAKAF TUNAI: TELAHAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002" telah dapat untuk diujikan.

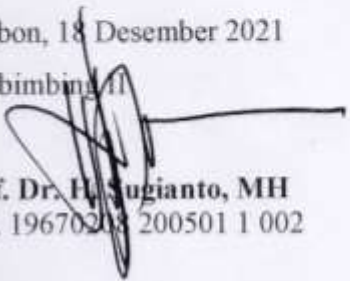
Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 18 Desember 2021

Pembimbing 1


Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 19670203 200501 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
WAKAF TUNAI: TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

Disusun Oleh :

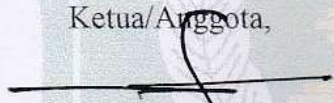
Ahmad Nur Fadilah

NIM. 18086040017

Telah diujikan pada tanggal, 01 Desember 2021
dan, dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)
Cirebon, 01 Desember 2021

Dewan Penguji

Ketua/Anggota,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

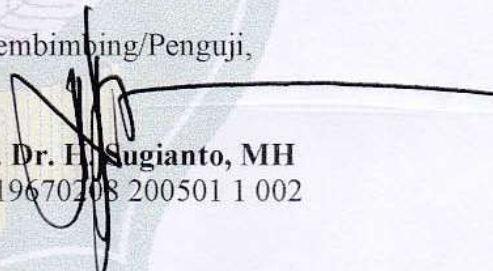
Sekretaris/Anggota,


H. Didin Nurul Rasyidin, MA., Ph.D
NIP. 19730404 199803 1 005

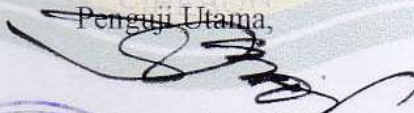
Pembimbing/Penguji,


Dr. H. Slamet Firdaus, MA
NIP. 19571109 198803 1 002

Pembimbing/Penguji,


Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 19670308 200501 1 002

Penguji Utama,


Dr. H. Samsudin, M.Ag.
NIP. 19610328 199303 1 003

Direktur,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590321 1983 1 002



ABSTRAK

AHMAD NUR FADILAH. NIM: 18086040017. “WAKAF TUNAI: TELAHAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002”, 2021.

Pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia sangat potensial, terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak, terutama setelah muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai. Pada penelitian ini menitik beratkan pada kajian mendalam berkenaan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan alasan pokoknya tentang bagaimana lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai berikut dengan mekanisme penetapan fatwanya. Dimana dalam sebuah fatwa erat kaitannya dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang digunakan MUI dan penggunaan istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai.

Dari hasil penelitian ini, kemudian didapatkan bahwa sesungguhnya fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai lahir, dilatar belakangi oleh suatu kondisi dimana terjadi ketimpangan dan kondisi perekonomian yang cukup memperhatikan dan jurang yang sangat dalam antara golongan menengah keatas dengan golongan masyarakat umum dimana hidup dibawah garis kemiskinan yang kebetulan hal di dominasi oleh mayoritas beragama Islam. Disisi lain adanya masukan dan permohonan masyarakat yang menginginkan sebuah fatwa yang mengatur tentang wakaf, atas dasar itu kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon fenomena tersebut dengan berbagai pertimbangan yaitu memiliki kemashlahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Adapun dalil-dalil *qat'i* yang menjadi pedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang pada umumnya membahas berkaitan dengan anjuran berinfak ke jalan kebaikan dan salah satu yang ada di dalamnya adalah wakaf. hal ini mengingat dalam literatur-literatur fiqih, wakaf yang dijumpai adalah demikian adanya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam az-Zuhaili. Begitu pun dengan hadits-hadits yang dipakai sebagai legalitas normatif wakaf ini adalah relatif minim, sehingga legalitas formal terkait wakaf ini lebih banyak dihasilkan dari proses *ijtihad* dari *fugaha* sebagai instrumen analisis *istihsan*, *istislah* dan *urf*. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam klausul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang. Kemudian Metode istinbath hukum yang digunakan MUI tidak hanya terpaku pada satu pendapat imam mazhab. Hal ini sebagaimana bukti dari fatwa yang merujuk pada pendapat diluar mazhab Syafi'i. Seperti mengambil pada pendapat hanafiyah. Dimana ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-urf*. Disamping memiliki dasar pertimbangan dalil nash (hadits Ibn Umar) yang berbunyi *ihbas ashlahah wa saabbil tsamarataha*, dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia, lebih melihat pada aspek *mashlahah* dalam mewujudkan kesejahteraan hidup umat Islam.

Kata Kunci: Telaah Fatwa MUI, Wakaf Tunai, Wakaf Uang, Fatwa MUI

ABSTRACT

AHMAD NUR FADILAH. NIM: 18086040017. "CASH WAKF: REVIEW OF THE FATWA OF THE INDONESIAN ULAMA ASSEMBLY NUMBER 2 YEAR 2002", 2021.

The implementation of cash waqf in Indonesia is very potential, especially since Indonesia is the country with the largest population, especially after the fatwa of the Indonesian Ulama Council No. 2 of 2002 concerning cash waqf appeared. This study focuses on an in-depth study of the fatwa of the Indonesian Ulama Council regarding the main reason for the birth of the fatwa of the Indonesian Ulama Council No. 2 of 2002 concerning cash waqf and the mechanism for determining the fatwa. Where in a fatwa is closely related to the use of legal arguments used by the MUI and the use of legal istinbath of the Indonesian Ulama Council fatwa No. 2 of 2002 concerning cash waqf.

From the results of this study, it was found that in fact the fatwa of the Indonesian Ulama Council No. 2 of 2002 concerning cash waqf was born, motivated by a condition where inequality and economic conditions were quite worrying and the gap was very deep between the middle class and above with the general public. live below the poverty line which happens to be dominated by the majority of Muslims. On the other hand, there are inputs and requests from people who want a fatwa that regulates waqf, on that basis, the Indonesian Ulama Council (MUI) responds to this phenomenon with various considerations, namely having great benefits that other objects do not have. The qat'i arguments that serve as guidelines for the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) are the verses of the Qur'an which generally discuss the recommendation to donate to the way of goodness and one of them is waqf. This is because in the fiqh literature, the waqf found is as it is stated by Imam az-Zuhaili. Likewise, the hadiths that are used as the normative legality of waqf are relatively minimal, so that the formal legality related to waqf is mostly produced from the ijtihad process of the fuqaha as an instrument of istihsan, istislah and urf analysis. This is as seen in the fatwa clause of the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding cash waqf. Then the legal istinbath method used by MUI is not only fixed on one opinion of the priest of a school of thought. This is as evidence from the fatwa which refers to opinions outside the Shafi'i school. Like taking the opinion of Hanafiah. Where the Hanafi school of law allows waqf of dinars and dirhams as an exception on the basis of istihsan bi-urf. Besides having the basis for consideration of the textual argument (hadith of Ibn Umar) which reads ihbas ashlaha wa saabbil tsamarataha, the basis of consideration used by the Indonesian Ulama Council, looks more at the maslahah aspect in realizing the welfare of Muslims' lives.

Keywords: MUI Fatwa Study, Cash Waqf, Cash Waqf, MUI Fatw

المخلص

احمد نور فضله. نم ٢٠١٧.٤٠١٧.١٨٠٨٦٠٤٠١٧"وقف النقود: مراجعة فتوى جمعية أولاما الإندونيسية رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الوقف النقدي"، ٢٠٢١.

يعد تنفيذ الوقف النقدي في إندونيسيا أمراً محتملاً للغاية ، خاصة وأن إندونيسيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان ، خاصة بعد ظهور فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الوقف النقدي. تركز هذه الدراسة على دراسة متعمقة لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي بخصوص السبب الرئيسي لولادة فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الوقف النقدي وآلية تحديد الفتوى. حيث ترتبط الفتوى ارتباطاً وثيقاً باستخدام الحجج القانونية التي يستخدمها مجلس العلماء الإندونيسي واستخدام الاستنباط القانوني لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الوقف النقدي.

من نتائج هذه الدراسة ، تبين أنه في الواقع ولدت فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الوقف النقدي ، بدافع من حالة كان عدم المساواة والظروف الاقتصادية مقلقة للغاية وكانت الفجوة عميقة جداً بين الطبقة الوسطى وما فوقها مع عامة الناس. يعيشون تحت خط الفقر الذي تصادف أن يهيمن عليه غالبية المسلمين. من ناحية أخرى ، هناك مدخلات وطلبات من الناس الذين يريدون فتوى تنظم الوقف ، وعلى هذا الأساس ، يستجيب مجلس العلماء الإندونيسي لهذه الظاهرة باعتبارها مختلفة ، وهي أن يكون لها فائدة كبيرة لا تملكها الأشياء الأخرى. إن الحجج القطاعية التي تعمل كمبادئ توجيهية لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي هي آيات من القرآن تناقش بشكل عام التوصية بالتبرع لطريقة الخير وأحدها الوقف. وذلك لأن الوقف في الفقه كما نص عليه الإمام الزحيلي. وبالمثل ، فإن الأحاديث المستخدمة كشرعية معيارية للوقف ضئيلة نسبياً ، لذا فإن الشرعية الشكلية المتعلقة بالوقف تنتج في الغالب من عملية اجتهاد الفقهاء كأداة لتحليل الاستحسان والاستصلاح والعرف. هذا ما يظهر في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي بخصوص الوقف النقدي. ومن ثم فإن طريقة الاستنباط القانونية التي يستخدمها مجلس العلماء الإندونيسي ليست مثبتة فقط على رأي واحد لكاهن مذهب. وهذا دليل من الفتوى في أقوال خارج المذهب الشافعي. كأخذ رأي حنفي. حيث تجيز المذهب الحنفي الوقف بالدينار والدرهم كاستثناء على أساس الاستحسان بالعرف. إلى جانب وجود أساس للنظر في الحجة النصية (حديث ابن عمر) الذي يقرأ احبس أصلهاوسبل ثمرتها، وهو أساس الاعتبار الذي يستخدمه مجلس العلماء الإندونيسي ، ينظر أكثر إلى جانب المصلحة في تحقيق رفاهية حياة المسلمين.

الكلمات المفتاحية: دراسة فتوى وزارة الداخلية ، الوقف النقدي ، الوقف النقدي ، فتوى وزارة الداخلية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم
والصلاة والسلام سيدنا محمد سيد العرب والعجم
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أم بعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan semua pihak. Shalawat serta salam mudah-mudahan ditetapkan untuk baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, shahabatnya, dan ummatnyahingga akhir zaman. Amīnn...

Tesis berjudul: WAKAF TUNAI: TELAHAH FATWA MUI NO 2 TAHUN 2002 TENTANG WAKAF TUNAI, merupakan upaya maksimalk penulis dalam memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dengan ungkapan rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi, penulis patut mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong hingga usainya tugas ini. Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumanta, M. Ag., selaku Rektor Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberkan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaganya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Slamet Firdaus, M.A, Selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, M.H, Selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini.

5. Para pimpinan dan pengelola Program Pascasarjana Prodi Hukum Perdata Islam IAIN Syekh Nurjat Cirebon, yang sudah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
6. Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moral maupun materi kepada penulis ketika mengikuti studi di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan di Program Pascasarjana Prodi Hukum Perdata Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang telah banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi walaupun banyak kendala yang dihadapi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan terbatas ini.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan membalas amal baik mereka.
Amînn...

Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini dapat memberikan manfaat adanya. Terimakasih...



Cirebon, 22 Oktober 2021

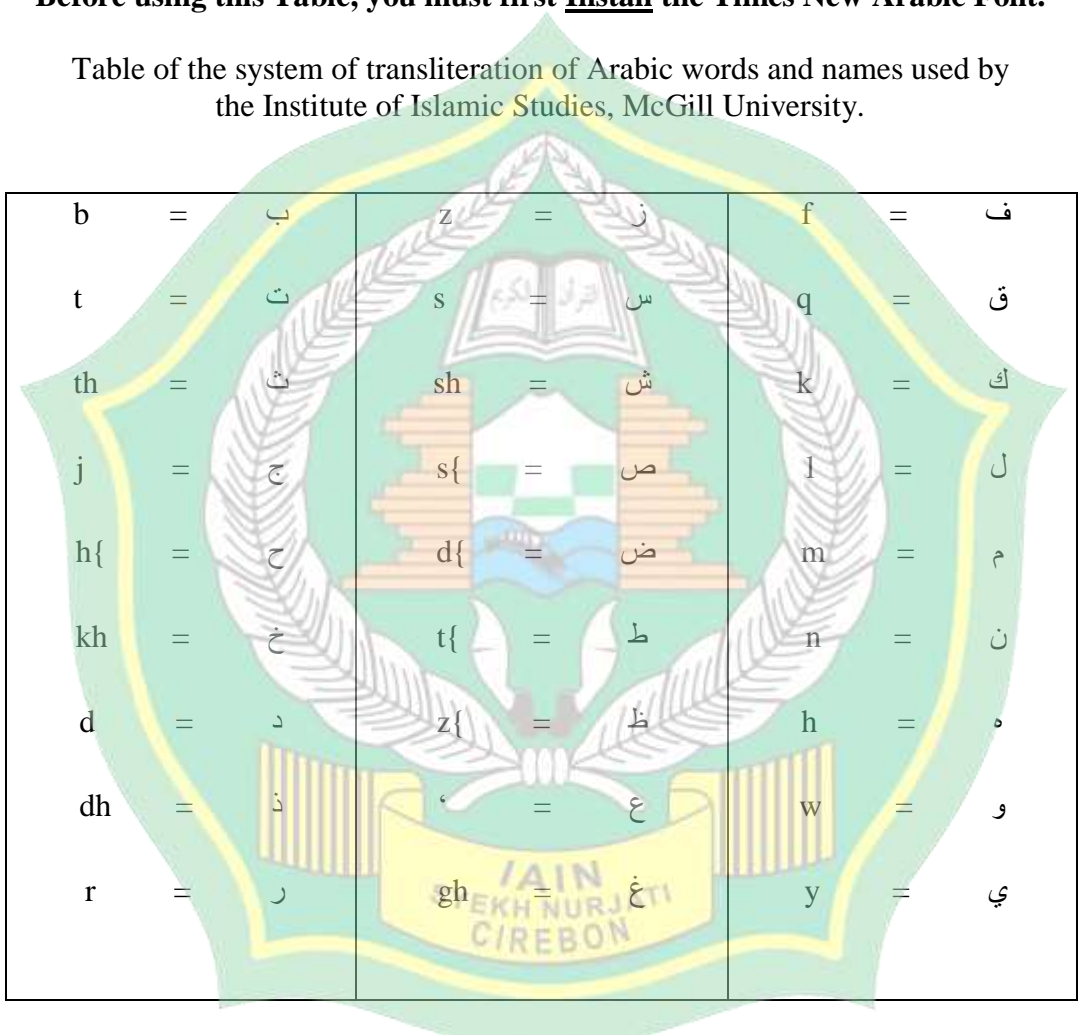
Penulis,

Ahmad Nur Fadilah

Transliteration

Before using this Table, you must first Install the Times New Arabic Font.

Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.




b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	s{	=	ص	l	=	ل
h{	=	ح	d{	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	t{	=	ط	n	=	ن
d	=	د	z{	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

Short: a = اَ ; i = اِ ; u = اُ

Long: ā = آ ; ī = يِ ; ū = وِ

Diphthong: ay = اِي ; aw = اَوْ



The logo of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a green shield-shaped emblem. It features a central white book with Arabic calligraphy, flanked by two white wings. Below the book is a blue and white architectural structure. The entire emblem is set against a green background with a yellow border. At the bottom of the shield, a yellow banner contains the text "IAIN SYEKH NURJATI CIREBON".

DAFTAR ISI	
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian.....	iii
Nota Dinas	iv
Abstrak	vii
Kata Pengantar	x
Pedoman Transliterasi	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Metodologi Penelitian	17

F. Sistematika Penulisan	28
BAB II KONSEP DASAR WAKAF TUNAI DAN FATWA	30
A. Wakaf Tunai Menurut Syareat dan Undang-undang	30
1. Pengertian dan Tujuan Wakaf Tunai.....	30
2. Syarat dan Rukun Wakaf Tunai	42
3. Implementasi Wakaf Tunai	45
B. Hakekat Wakaf.....	55
1. Pengertian fatwa.....	57
2. Syarat-syarat Mufti.....	59
3. Metode Istibath Hukum dalam Berfatwa	63
4. Kedudukan Fatwa.....	69
C. Relasi Wakaf Tunai dan Fatwa	71
1. Wakaf Tunai dalam Perdebatan	71
2. Urgensi Fatwa Wakaf Tunai.....	78
BAB III MUI DAN FATWA NO. 2 TAHUN 2002	83
A. MUI dan Lembaga Fatwa	84
1. Sejarah MUI	84
2. Visi dan Misi MUI	90
3. Posisi, Peran, dan Tugas MUI.....	92
4. Kedudukan Fatwa dan Peran Lembaga Fatwa	96
B. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002	101
1. Kaitan Fatwa Wakaf Tunai dengan UU No. 41 Tahun 2004.....	101
2. Prosedur Penetapan Fatwa Wakaf Tunai.....	105

3. Metode Penetapan Wakaf Tunai	118
BAB IV ANALISIS FATWA MUI TENTANG WAKAF TUNAI	124
A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Wakaf Tunai	124
B. Penggunaan Dalil Hukum Fatwa Wakaf Tunai	130
C. Istinbath Hukum Fatwa Wakaf Tunai	135
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
Daftar Pustaka	146

